



OPEN ACCESS

Sitasi: Saksono, H. (2025). Integrasi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Urgensi, Tantangan, & Strategi Penguatannya. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(2), 123–134. <https://doi.org/10.21787/mp.9.2.2025.123-134>

Dikirim: 27 Maret 2025

Diterima: 11 Oktober 2025

Diterbitkan: 30 November 2025

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci: Intelijen Ekonomi; Tata Kelola; Pemerintahan Daerah; Ketahanan Nasional.

ARTIKEL

Integrasi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Urgensi, Tantangan, & Strategi Penguatannya

Integration of Economic Intelligence in Regional Governance

Urgency, Challenges, & Strengthening Strategies

Herie Saksono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Mataram, Indonesia

✉ herie.saksono26@gmail.com

Abstrak: Studi ini mengkaji urgensi integrasi intelijen ekonomi dalam tata Kelola pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya fungsi intelijen ekonomi dalam struktur DJ PPU Kementerian Dalam Negeri dan operasionalisasinya oleh Badan Kesbangpol Pemda yang berimplikasi terhadap kinerja ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model integrasi intelijen ekonomi adaptif, menganalisis dampak yang terjadi akibat belum optimalnya fungsi tersebut, dan merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan aktor kebijakan, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Studi ini menemukan adanya hambatan transformasi intelijen ekonomi sehingga memerlukan integrasi sistemik. Kesenjangan kapasitas SDM turut memengaruhi proses adaptasi teknologi dan digitalisasi, dan kebutuhan regulasi termasuk sinkronisasi dan harmonisasinya. Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan pengembangan SDM berkompetensi analitis, modernisasi infrastruktur digital, dan penguatan jejaring lintas lembaga. Implementasi efektif intelijen ekonomi berkontribusi nyata pada pengambilan keputusan berbasis bukti, ketahanan ekonomi daerah, dan kredibilitas kelembagaan Pemerintah dan Pemda. Kebaruan studi ini terletak pada model integrasi adaptif konteks Indonesia, dimana mekanisme koordinasi pemerintahan yang bersifat multi-level lebih presisi ketika disertai penerapan strategi-kompetitif dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi dari Pusat-Daerah. Studi menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi intelijen ekonomi sangat bergantung pada integrasi vertikal-horizontal dalam struktur pemerintahan. Karenanya, direkomendasikan untuk formalisasi fungsi intelijen ekonomi Pusat-Daerah melalui Badan Kesbangpol, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, Menyusun program pengembangan SDM berkelanjutan, pelebagaan Forum Koordinasi Intelijen Ekonomi Pusat-Daerah, dan menerapkan sistem monitoring berbasis kinerja.

Abstract: This study examines the urgency of integrating economic intelligence into regional governance as a single entity within the domestic governance system. The main problem is the suboptimal function of economic intelligence within the Directorate General of Politics and Public Administration of the Ministry of Home Affairs of the Republic Indonesia's structure and its operationalization by the Regional Government's

Keywords: *Economic Intelligence; Governance; Regional Government; National Resilience.*

Kesbangpol Agency, which has implications for the performance of economic, social, and cultural resilience. This study aims to develop an adaptive economic intelligence integration model, analyze the impacts of this suboptimal function, and formulate strategies for strengthening institutional capacity. Using a qualitative-exploratory approach, data were collected through documentation studies, in-depth interviews with policy actors, and field observations, then analyzed using thematic analysis techniques. This study found obstacles to the transformation of economic intelligence, requiring systemic integration. The gap in human resource capacity also influences the process of technology adaptation and digitalization, and the need for regulations, including their synchronization and harmonization. In the context of strengthening institutional capacity, it is necessary to develop human resources with analytical competence, modernize digital infrastructure, and strengthen cross-institutional networks. Effective implementation of economic intelligence contributes significantly to evidence-based decision-making, regional economic resilience, and the institutional credibility of the Government and Regional Governments. The novelty of this study lies in the adaptive integration model of the Indonesian context, where multi-level government coordination mechanisms are more precise when accompanied by the implementation of competitive strategies in strengthening integrated institutional capacity from the Central-Regional Government. The study concludes that the successful implementation of economic intelligence is highly dependent on vertical-horizontal integration within the government structure. Therefore, it is recommended to formalize the Central-Regional economic intelligence function through the Kesbangpol Agency, develop an integrated information system, develop a sustainable human resource development program, institutionalize the Central-Regional Economic Intelligence Coordination Forum, and implement a performance-based monitoring system.

1. Pendahuluan

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi nasional dan daerah [Csurgai \(1998a\)](#) menjelaskan bahwa transformasi lanskap geo-politik dan geo-ekonomi global telah menuntut adanya sistem intelijen ekonomi yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ancaman dan peluang ekonomi. Dalam konteks ini, adaptivitas sistem intelijen ekonomi merupakan konsep utama dalam hubungan antara geo-politik, geo-ekonomi, dan kebijakan nasional. Kasus volatilitas harga komoditas strategis, seperti minyak dan pangan, serta efek domino krisis keuangan global, menunjukkan urgensi hadirnya sistem intelijen ekonomi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar global ([Muravska, 2023](#); [Starostina et al., 2022a](#)).

Saat ini, salah satu pengampu tugas dan fungsi intelijen ekonomi adalah Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (DJ PPU) Kementerian Dalam Negeri. Implementasi fungsi intelijen ekonomi masih memerlukan dukungan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) agar dapat menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional hingga mampu berkinerja secara prima, ultima, dan optima. Padahal, dalam konteks intelijen ekonomi, kapasitas institusional menjadi elemen penting yang berperan strategis-kompetitif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. [Balanda & Cherniak \(2022a\)](#) menunjukkan bahwa ekonomi nasional sangat bergantung pada kapasitas institusional dalam mengelola intelijen ekonomi, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman lintas sektor dan merumuskan respons yang terkoordinasi.

Dalam konteks pemerintahan modern, intelijen ekonomi tidak lagi sekadar instrumen pengumpulan informasi, tetapi telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang vital untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Lan et al., 2023a). Intelijen ekonomi modern berfungsi sebagai alat analisis komprehensif yang memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi dan merespons dinamika ekonomi-politik yang semakin kompleks dan tidak terprediksi. Anis & Susdarwono (2020a) menekankan bahwa pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti literasi data & kemampuan analitis, menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sistem intelijen ekonomi yang efektif. Sementara, Gaiser (2011a) menjelaskan bahwa intelijen ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan infrastruktur vital negara melalui integrasi teknologi dan analisis prediktif untuk mengantisipasi ancaman siber dan ekonomi. Tanpa sistem ini, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam merespons peluang dan mengantisipasi ancaman ekonomi yang berimplikasi langsung pada stabilitas politik dan keamanan nasional.

Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi mencakup tiga aspek krusial. Pertama, Model Integrasi. Hingga saat ini belum ada model integrasi intelijen ekonomi yang komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia (El Mountassir, 2020a; Saksono et al., 2023a). Banyak studi telah mengkaji peran intelijen ekonomi dalam tata kelola pemerintahan secara umum, namun keberadaan model yang aplikatif dalam konteks desentralisasi dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan pusat-daerah masih sangat terbatas. Fragmentasi sistem informasi antara Pusat-Daerah, sebagaimana ditekankan oleh Sidhom et al., (2010a), menyebabkan keterlambatan respons terhadap ancaman ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas nasional dan daya saing regional. Hal ini dapat dimaknai bahwa kegagalan integrasi intelijen ekonomi akibat kelemahan desain kelembagaan.

Kedua, Peran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Minimnya kajian tentang peran strategis Badan Kesbangpol dalam pengelolaan intelijen ekonomi di tingkat daerah (Balanda & Cherniak, 2022b). Walaupun Badan Kesbangpol memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di daerah, namun optimalisasi perannya dalam pengelolaan intelijen ekonomi belum mendapat perhatian yang memadai. Balanda & Cherniak (2022c) menekankan pentingnya fungsi intelijen ekonomi di level operasional, namun belum secara spesifik mengkaji peran lembaga seperti Badan Kesbangpol dalam konteks Indonesia.

Ketiga, Mekanisme Koordinasi. Belum teridentifikasinya mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai level pemerintahan dalam pengelolaan intelijen ekonomi (Ivan, 2013a; Lončar, 2022). Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas mengakibatkan duplikasi, tumpang tindih, dan inefisiensi dalam pengumpulan serta analisis intelijen ekonomi, sehingga menghambat respons efektif terhadap ancaman.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah belum optimalnya integrasi intelijen ekonomi dalam struktur pemerintahan dalam negeri di Indonesia. Hal ini dimanifestasikan dalam 3 (tiga) permasalahan spesifik. Pertama, lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan intelijen ekonomi. Sidhom et al., (2010b) mengidentifikasi bahwa fragmentasi dalam pengelolaan informasi ekonomi sering menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem intelijen ekonomi yang efektif.

Kedua, terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam menganalisis dan memanfaatkan data ekonomi untuk pengambilan keputusan strategis. Aissa et al., (2018a) menekankan bahwa pengelolaan intelijen ekonomi yang efektif memerlukan infrastruktur dan kapasitas analitis yang memadai, yang saat ini masih menjadi tantangan di berbagai

level pemerintahan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan [Anis & Susdarwono \(2020b\)](#) kebutuhan akan penguatan keterampilan analitis dalam pengelolaan intelijen ekonomi.

Ketiga, belum adanya kerangka regulasi yang memadai untuk mengintegrasikan fungsi intelijen ekonomi dalam struktur pemerintahan. [Starostina et al., \(2022b\)](#) menekankan pentingnya kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif sebagai fondasi bagi sistem intelijen ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Ketiadaan kerangka regulasi yang jelas mengakibatkan ambiguitas kewenangan, tumpang tindih fungsi, dan ketidakjelasan prosedur operasional standar dalam pengelolaan intelijen ekonomi yang menghambat implementasi dan keberlanjutan sistem intelijen ekonomi dalam struktur pemerintahan.

Mengacu uraian di atas, studi ini mengajukan tiga pertanyaan, yakni: 1) Bagaimana model integrasi intelijen ekonomi yang efektif dalam struktur DJ PPU Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol di daerah? 2) Apa implikasi ketiadaan fungsi intelijen ekonomi terhadap ketahanan ekonomi nasional dan daerah? dan 3) Bagaimana strategi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan intelijen ekonomi di berbagai level pemerintahan? Bertolak dari rangkaian pertanyaan tersebut, studi ini ditujukan untuk mengembangkan model integrasi adaptif, menganalisis dampak ketiadaan fungsi intelijen ekonomi, dan merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan.

Tujuan-tujuan ini selaras dengan rekomendasi [Haddadi et al., \(2020a\)](#) dan perspektif [\(Cabrera Toledo, 2016a\)](#) mengenai pentingnya sistem intelijen ekonomi yang terintegrasi dan adaptif, terutama untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini dibangun di atas tiga level teori yang saling mengait. Teori besar (*grand theory*) yang digunakan adalah teori ketahanan nasional dan teori sistem ([Brand, 1996a](#); [Potter, 1998a](#)). Teori ketahanan nasional membantu memahami kontribusi intelijen ekonomi terhadap kedaulatan dan keamanan ekonomi. [Belkacemi & Rabekolo \(2024\)](#) menegaskan bahwa intelijen ekonomi memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui sinergi antara inovasi ilmiah dan kebijakan ekonomi, dengan menunjukkan bagaimana negara yang memiliki sistem intelijen ekonomi yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi global ([Saksono, 2025](#)). Adapun teori sistem yang dikemukakan oleh [Potter \(1998b\)](#) membantu memahami dinamika interaksi antarkomponen dalam ekosistem intelijen ekonomi, serta bagaimana perubahan pada satu elemen dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Pada tataran teori rentang menengah (*middle-range theory*), digunakan teori intelijen ekonomi [Revel \(2010a\)](#) yang menyediakan kerangka analitis untuk memahami siklus pengelolaan informasi ekonomi. Didukung teori resiliensi organisasi ([Hallegatte, 2014a](#); [Vargas-Hernández & Cota, 2022b](#)) yang menjelaskan bagaimana organisasi Pemerintah membangun ketahanan melalui pemanfaatan intelijen ekonomi. Pada akhirnya, [Di Stefano \(2023\)](#) menawarkan kerangka analitis modern untuk memahami siklus pengelolaan informasi ekonomi, termasuk pengumpulan data, analisis prediktif, dan integrasi dalam pengambilan Keputusan strategis. Pada tahap penerapan (*applied theory*), diadopsi teori pengambilan keputusan berbasis intelijen ([Haddadi et al., 2020b](#)) dan teori manajemen pengetahuan dalam konteks pemerintahan ([Aissa et al., 2018b](#)) untuk mengintegrasikan hasil analisis intelijen ke dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam upaya mengungkap *State-of-the-Art* (SOTA), kajian intelijen ekonomi menunjukkan perkembangan signifikan. [Cullen & Munro \(2023a\)](#) mengaitkan intelijen ekonomi dengan pencegahan bencana dan pengembangan ketahanan lokal,

sedangkan [Starostina et al., \(2022c\)](#) mengembangkan Indeks Intelijen Ekonomi yang mengukur efektivitas sistem intelijen dan hubungannya dengan kinerja perdagangan internasional. Sementara itu, [Lan et al., \(2023b\)](#) memperkenalkan model pengambilan Keputusan cerdas berbasis kecerdasan buatan dalam pemerintahan, dan [Saksono et al., \(2023b\)](#) menunjukkan bahwa aplikasi praktis intelijen ekonomi dalam konteks desentralisasi di Indonesia memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan optimalisasi potensi lokal dan stabilitas sosial-politik.

Kebaruan studi ini terletak pada perumusan model integrasi intelijen ekonomi yang adaptif dan kontekstual bagi sistem pemerintahan desentralistik di Indonesia, yang hingga kini belum banyak dikaji secara spesifik dalam literatur intelijen ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya menempatkan intelijen ekonomi pada level negara atau korporasi secara terpisah ([Brand, 1996b](#); [El Mountassir, 2020b](#); [Revel, 2010b](#)) penelitian ini secara eksplisit mengaitkan fungsi intelijen ekonomi dengan arsitektur pemerintahan pusat–daerah, dengan menempatkan DJ PPU Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol sebagai aktor kunci dalam integrasi vertikal dan horizontal. Selain itu, pada identifikasi mekanisme koordinasi multi-level yang operasional, bukan semata normatif, dalam pengelolaan intelijen ekonomi pemerintahan. Permasalahan utama bukan hanya ketiadaan informasi, melainkan fragmentasi sistem, lemahnya standarisasi prosedur, dan belum terlembaganya alur analisis intelijen ekonomi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dengan kata lain, studi ini melampaui pendekatan konseptual dengan menawarkan kerangka integrasi fungsional yang dapat diimplementasikan dalam struktur pemerintahan yang ada, sebagaimana direkomendasikan oleh [Potter \(1998c\)](#) dan [Sidhom et al., \(2010c\)](#). Pada akhirnya, terformulasinya strategi penguatan kapasitas kelembagaan intelijen ekonomi yang bersifat simultan dan saling terkait, mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) analitis, modernisasi infrastruktur informasi, dan penguatan jejaring koordinasi pusat–daerah. Strategi ini dikonstruksikan secara spesifik dalam konteks Badan Kesbangpol sebagai simpul operasional intelijen ekonomi daerah, suatu aspek yang masih relatif minim dibahas dalam kajian intelijen ekonomi sebelumnya ([Balanda & Cherniak, 2022d](#); [Saksono et al., 2023b](#)). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menjembatani kesenjangan antara konsep intelijen ekonomi dan implementasinya dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian eksploratif untuk mengkaji secara mendalam urgensi integrasi intelijen ekonomi dalam struktur organisasi dan tata kerja (administrasi) pemerintahan. Pemilihan pendekatan kualitatif eksploratif didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena integrasi intelijen ekonomi dalam struktur pemerintahan merupakan isu kompleks yang memerlukan tinjauan praktis secara institusional karena melibatkan berbagai dimensi (struktural, prosedural, teknologi, dan sumber daya manusia) yang memerlukan pemahaman mendalam dan kontekstual ([Creswell & Poth, 2016](#)).

Unit analisis yang dipilih adalah Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Dit. Tan. Ekososbud) pada DJ PPU Kementerian Dalam Negeri. Pemilihan ini didasarkan pertimbangan bahwa Dit. Tan. Ekososbud tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dibidang intelijen ekonomi termasuk pembinaan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karenanya, pembahasan lebih difokuskan pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran intelijen ekonomi yang dikelola oleh Dit. Tan. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri.

Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi (dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan publikasi resmi), wawancara mendalam dengan Direktur Tan. Ekososbud dan 3 (tiga) pejabat berkompeten di Dit. Tan. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri. Studi ini merupakan refleksi atas undangan dalam beberapa even kegiatan yang diselenggarakan Dit. Tan. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diperoleh restu dan izin untuk melakukan observasi terhadap praktik institusional dalam tata kelola intelijen ekonomi. Dalam upaya menjaga validitas, akurasi, dan kredibilitas data digunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui tahapan familiarisasi, pemberian kode, pencarian tema, peninjauan, pendefinisian, dan penulisan laporan (Braun & Clarke, 2006).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis tematik mengerucut pada 3 (tiga) tema, yakni: 1) Transformasi Fungsi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan; 2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan 3) Dampak Strategis terhadap Kinerja Pemerintahan.

3.1. Transformasi Fungsi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa transformasi fungsi intelijen ekonomi dalam struktur Dit. Han. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri merupakan kebutuhan struktural yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Intelijen ekonomi tidak lagi dapat dipahami sebatas aktivitas pengumpulan dan pelaporan data ekonomi, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen analitis-prediktif yang terintegrasi dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Peran prediktif intelijen ekonomi diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama tentang pentingnya analisis data untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sarjito et al., (2024) yang menegaskan bahwa intelijen ekonomi modern berfungsi sebagai sistem analisis strategis yang memungkinkan negara mengantisipasi risiko ekonomi melalui pengolahan informasi lintas sektor secara komprehensif.

Transformasi fungsi intelijen ekonomi tersebut mengemuka dalam 3 (tiga) dimensi utama. Pertama adalah kebutuhan akan integrasi sistemik, yang mencakup pengembangan sistem informasi ekonomi terintegrasi lintas unit kerja dan lintas level pemerintahan. Fragmentasi sistem informasi, sebagaimana diidentifikasi oleh Sidhom et al., (2010e), terbukti menjadi faktor penghambat utama dalam respons kebijakan yang cepat dan akurat. Tanpa integrasi vertikal dan horizontal yang memadai, informasi strategis kehilangan nilai operasionalnya dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan sebagaimana ditekankan oleh Ivan (2013) menjadi fondasi utama dalam transformasi fungsi intelijen ekonomi, termasuk penguatan mekanisme umpan balik yang diusulkan Aissa et al., (2018c). Ketiga aspek ini membentuk landasan untuk transformasi fungsi intelijen ekonomi yang efektif dalam struktur pemerintahan. Pengalaman Prancis dan Jepang menunjukkan keberhasilan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan intelijen ekonomi yang menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga dalam jaringan informasi yang koheren dan responsif.

Dimensi kedua berkaitan dengan adaptasi teknologi dan inovasi analitik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi analisis data, termasuk big data analytics dan sistem pendukung keputusan, merupakan prasyarat bagi intelijen ekonomi yang efektif. Lan et al., (2023) menegaskan bahwa pengambilan keputusan pemerintahan

modern menuntut sistem analitik cerdas yang mampu mengolah volume data besar secara cepat dan akurat disertai dukungan inovasi sebagaimana ditekankan [Bourass & Outmane \(2024\)](#). Adaptasi teknologi dan inovasi menjadi sangat penting mengingat percepatan perubahan dalam lanskap ekonomi global memerlukan respons cepat, akurat, kreatif, dan inovatif dari pemerintah. Adaptasi teknologi, termasuk *big data analytics* dan *artificial intelligence* (AI), sebagai alat utama dalam transformasi intelijen ekonomi, bahkan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan Keputusan ekonomi di tingkat pemerintahan. Tanpa dukungan teknologi tersebut, fungsi intelijen ekonomi berisiko terjebak pada pola kerja administratif konvensional yang tidak lagi relevan dengan kompleksitas tantangan ekonomi global.

Dimensi ketiga adalah penguatan kerangka regulasi, khususnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta standarisasi prosedur operasional. Temuan ini memperkuat argumen [Revel \(2010c\)](#) dan [Potter \(1998d\)](#) bahwa keberlanjutan sistem intelijen ekonomi sangat bergantung pada kejelasan norma, pembagian kewenangan, dan mekanisme evaluasi kinerja. Urgensi dimensi adalah kepastian keberlanjutan dan konsistensi implementasi fungsi intelijen ekonomi di berbagai level pemerintahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa harmonisasi regulasi antara Pusat-Daerah merupakan fondasi bagi keberlanjutan sistem intelijen ekonomi, dengan fokus pada standarisasi prosedur operasional dan evaluasi kinerja. Harmonisasi regulasi menjadi elemen kunci dalam membangun, memperkuat, dan mengoperasionalkan sistem intelijen ekonomi yang terintegrasi. Tanpa regulasi yang selaras, implementasi intelijen ekonomi akan bersifat parsial dan tidak konsisten antardaerah, sehingga melemahkan fungsi strategisnya dalam tata kelola pemerintahan.

3.2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pembahasan terhadap tema penguatan kapasitas kelembagaan menegaskan bahwa efektivitas intelijen ekonomi di tingkat daerah, khususnya melalui Badan Kesbangpol, sangat ditentukan oleh kapasitas institusional yang dibangun secara sistematis. [Balanda & Cherniak \(2022e\)](#) menunjukkan bahwa intelijen ekonomi tidak dapat berfungsi optimal tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, karena analisis intelijen memerlukan kombinasi antara kompetensi manusia, infrastruktur teknis, dan jejaring koordinatif.

Faktor pertama yang menonjol adalah pengembangan sumber daya manusia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keterbatasan kompetensi analitis dan literasi data masih menjadi kendala utama dalam operasionalisasi intelijen ekonomi di daerah. Hal ini menguatkan temuan [Anis & Susdarwono \(2020\)](#) yang menekankan pentingnya keterampilan abad ke-21, khususnya kemampuan analisis dan interpretasi data ekonomi, dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Penguatan SDM intelijen ekonomi tidak hanya menyangkut pelatihan teknis, tetapi juga pengembangan kemampuan prediktif dan koordinatif sebagaimana dikemukakan oleh [Siagian & SIK \(2024\)](#) dan [Lončar \(2022\)](#). Idealnya, pengembangan SDM wajib mencakup peningkatan keterampilan abad ke-21 (kemampuan analitis & literasi data), untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Faktor kedua adalah modernisasi infrastruktur dan sistem informasi. Analisis menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang terintegrasi menjadi prasyarat bagi aliran informasi yang efisien dan aman. [Ashiedu et al., \(2023\)](#) dan [Postolea & Bodea \(2021\)](#) menegaskan bahwa sistem intelijen ekonomi yang efektif harus ditopang oleh teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data secara real-time dan terlindungi. Modernisasi infrastruktur tidak hanya bersifat teknis, tetapi

juga menuntut penyesuaian proses bisnis agar selaras dengan kebutuhan analisis intelijen ekonomi yang dinamis.

Faktor ketiga adalah penguatan jejaring dan koordinasi lintas lembaga. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas intelijen ekonomi. [Saksono et al., \(2023c\)](#) menekankan bahwa dalam konteks desentralisasi, penguatan jejaring lintas daerah dan pusat-daerah memungkinkan pertukaran informasi strategis yang lebih efektif serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan jejaring lintas Lembaga tidak hanya penting untuk koordinasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan dalam konteks desentralisasi. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan intelijen ekonomi hanya dapat diperkuat apabila ketiga faktor tersebut dikembangkan secara simultan dan berkelanjutan.

3.3. Dampak Strategis terhadap Kinerja Pemerintahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi intelijen ekonomi yang terintegrasi dan berkapasitas memadai memberikan dampak strategis terhadap peningkatan kinerja pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan [Vargas-Hernández & Cota \(2022\)](#) yang mengidentifikasi hubungan positif antara kapasitas intelijen ekonomi dan resiliensi organisasi pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga area dampak utama dari implementasi efektif intelijen ekonomi. Dampak pertama tercermin dalam peningkatan kualitas kebijakan publik. Intelijen ekonomi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan responsif terhadap risiko sistemik. [Cabrera Toledo \(2016b\)](#) dan [Hallegatte \(2014\)](#) menekankan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi risiko ekonomi sangat bergantung pada kualitas analisis intelijen yang digunakan dalam proses kebijakan. Dengan demikian, intelijen ekonomi berperan sebagai instrumen penguatan rasionalitas kebijakan publik.

Dampak kedua adalah penguatan ketahanan ekonomi daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intelijen ekonomi berkontribusi pada peningkatan resiliensi ekonomi dan stabilitas sosial-politik daerah, terutama dalam konteks desentralisasi. [El Mountassir \(2020c\)](#) dan [Lončar \(2022\)](#) menegaskan bahwa ketahanan daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola informasi strategis dan merespons dinamika eksternal. Selain itu, penguatan ketahanan daerah melalui intelijen ekonomi semakin meningkatkan potensi lokal dan stabilitas sosial-politik dalam konteks desentralisasi. Secara tidak langsung, hal ini telah merefleksikan adanya hubungan antara intelijen ekonomi dan potensi lokal dalam desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Kesbangpol memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi intelijen ekonomi di daerah.

Dampak ketiga adalah peningkatan kredibilitas kelembagaan pemerintahan. Implementasi intelijen ekonomi yang efektif memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan melalui peningkatan transparansi, efektivitas koordinasi, dan kapasitas respons krisis. Kredibilitas kelembagaan ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan kebijakan dan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi tata kelola ekonomi. Ketiga dampak tersebut saling berkelindan dan membentuk siklus penguatan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

3.4. Langkah Strategis dan Arah Pengembangan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa model integrasi intelijen ekonomi yang relevan bagi konteks Indonesia adalah model integrasi adaptif pusat–daerah yang memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. Dalam konteks ini, Dit. Tan. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri menjadi simpul strategis di tingkat pusat, sementara Badan Kesbangpol sebagai aktor operasional di daerah. Integrasi tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional melalui sistem informasi terintegrasi, mekanisme koordinasi multi-level, dan standarisasi prosedur kerja. Dengan pendekatan ini, fragmentasi informasi dan lemahnya respons kebijakan dapat diminimalkan.

Bila ditinjau dari implikasi ketiadaan fungsi intelijen ekonomi yang terintegrasi, maka ketidakterpaduan fungsi intelijen ekonomi terbukti berimplikasi pada keterlambatan deteksi risiko, lemahnya antisipasi guncangan ekonomi, serta menurunnya kualitas kebijakan publik. Hal ini berdampak langsung pada kerentanan ketahanan ekonomi daerah dan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Hallegatte (2014) dan El Mountassir (2020d). Tanpa intelijen ekonomi yang terlembaga dan berkapasitas memadai, pemerintah daerah cenderung bersikap reaktif terhadap dinamika ekonomi, sehingga mengurangi efektivitas tata kelola dan stabilitas sosial-politik.

Sebagai solusinya, dirumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang bersifat simultan dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia berkompetensi analitis dan prediktif, modernisasi infrastruktur dan sistem informasi intelijen ekonomi, serta penguatan jejaring koordinasi pusat–daerah dan lintas sektor. Ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan karena kapasitas kelembagaan intelijen ekonomi daerah hanya akan efektif apabila didukung secara bersamaan oleh manusia, teknologi, dan tata kelola koordinatif.

Sebagai arah pengembangan, diperlukan penguatan basis evidensial melalui pengembangan kerangka pengukuran kinerja intelijen ekonomi yang lebih sistematis. Pengembangan indikator kuantitatif, dapat menjadi landasan untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan kebijakan. Selain itu, eksplorasi pemanfaatan teknologi analitik lanjutan dalam batas kewenangan pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur untuk meningkatkan akurasi analisis dan kualitas pengambilan keputusan. Intinya, intelijen ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung kebijakan, tetapi menjadi bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada ketahanan ekonomi berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi intelijen ekonomi dalam tata kelola pemerintahan dalam negeri di Indonesia mensyaratkan pengembangan model integrasi adaptif pusat–daerah yang selaras dengan karakter desentralisasi dan variasi kapasitas antardaerah. Model tersebut menempatkan Dit. Tan. Ekososbud DJ PPU Kementerian Dalam Negeri sebagai simpul strategis perumusan kebijakan dan pengendalian sistem, serta Badan Kesbangpol sebagai aktor operasional di tingkat daerah. Integrasi tidak semata bersifat struktural, tetapi juga fungsional melalui penyatuan sistem informasi, mekanisme koordinasi multi-level, dan standarisasi prosedur operasional. Dengan pendekatan ini, fungsi intelijen ekonomi dapat bertransformasi dari aktivitas administratif menjadi instrumen analitis-prediktif yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan atau lemahnya integrasi fungsi intelijen ekonomi berdampak pada keterlambatan deteksi risiko, rendahnya kualitas kebijakan, serta meningkatnya kerentanan ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Implementasi intelijen ekonomi yang terlembaga dan berkapasitas memadai terbukti berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik, penguatan ketahanan ekonomi daerah, serta peningkatan kredibilitas kelembagaan pemerintahan. Dampak tersebut hanya dapat dicapai apabila penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan secara simultan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi analitis, modernisasi infrastruktur dan sistem informasi, serta penguatan jejaring koordinasi pusat–daerah dan lintas sektor.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar Pemerintah memformalkan fungsi intelijen ekonomi secara eksplisit dalam struktur organisasi dan tata kerja DJ PPU Kementerian Dalam Negeri serta Badan Kesbangpol di daerah melalui penyelarasan regulasi dan kebijakan. Pengembangan sistem informasi intelijen ekonomi terintegrasi perlu diikuti dengan program penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan mekanisme koordinasi pusat–daerah yang terstandar. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan implementasi intelijen ekonomi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada ketahanan ekonomi nasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Budi Arwan, S.STP., M.Si., Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh staf yang membidangi Intelijen Ekonomi dan senantiasa aktif dan kolaboratif dalam diskusi dan komunikasi untuk penguatan operasionalisasi tugas dan fungsi intelijen ekonomi dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (termasuk pemerintahan daerah).

Referensi

- Aissa, B., Azouaou, F., Nader, F., & Chalal, R. (2018). EI-Annotate: An adaptive collective memory based on annotation ontology and context for decision making in economic intelligence. *International Journal of Business Information Systems*, 29(2), 207–232. <https://dx.doi.org/10.1504/IJBIS.2018.094693>
- Anis, A., & Susdarwono, E. T. (2020). 21st Century Skills of Economic Intelligence Related To the Resilience of the National Economy. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 127–139. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.9270>
- Ashiedu, B. I., Ogbuefi, E., Nwabekee, U. S., Ogeawuchi, J. C., & Abayomi, A. A. (2023). *Designing Financial Intelligence Systems for Real-Time Decision-Making in African Corporates*. <https://doi.org/10.54660/JFMR.2023.4.2.68-81>
- Balanda, A., & Cherniak, A. (2022). *Economic intelligence and counter-intelligence in ensuring national economic interests: theoretical and applied aspect*. <https://doi.org/10.56215/04221203.17>
- Belkacemi, M. A., & Rabekolo, F. (2024). L'état des lieux de l'intelligence économique en France, exploration par la méthode «color insight». (Étude jusqu'à 2018): The state of economic intelligence in France, exploration by the "color insight" method. (Study until 2018). *Journal of North African Economies*, 20(35), 1–14. <https://journals.univ-chlef.dz/index.php/renaf/article/view/165>
- Bourass, H., & Outmane, S. N. (2024). Economic Intelligence and Scientific Innovation: A Synergy Model for Competitiveness and Sustainability. *Revue Internationale de La Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, 2(2), 582–588. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10982055>
- Brand, J. H. (1996). *Economic Intelligence: A Key to Economic Power*. Citeseer. <https://www.scribd.com/document/598348264/1996-Economic-Intelligence-a-Key-to-Economic-Power>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Cabrera Toledo, L. (2016). La inteligencia estratégica: una herramienta necesaria para la toma de decisiones en el Estado del siglo XXI. *Revista Policía y Seguridad Pública*, 5648, 183–208. <https://doi.org/10.5377/rpsp.v5i2.2329>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Csurgai, G. (1998). *Geopolitics, geoeconomics and economic intelligence*. Canadian Institute of Strategic Studies= Institut canadien d'études stratégiques. https://geopolitics-geneva.ch/wp-content/uploads/2018/11/Geopolitics_Geoeconomics_CISS-1.pdf
- Cullen, M., & Munro, J. (2023). Preventing Disasters and Displacement: How Economic, Social, and Cultural Rights Can Advance Local Resilience. In *Reflections on the Future of Human Rights* (pp. 118–132). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003404620-7?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle
- Di Stefano, G. (2023). *The importance of economic intelligence for fostering national competitiveness: a comparison between France and Italy*. <https://unitesi.unive.it/handle/20.500.14247/13461>
- El Mountassir, Y. (2020). Economic Intelligence system and decision making: Proposal of a theoretical model. *Moroccan Journal of Quantitative and Qualitative Research*, 2(3), 137–152. <https://doi.org/10.48379/IMIST.PRSM/mjqr-v2i3.22005>
- Gaiser, L. (2011). *Resilient Critical Infrastructure And Economic Intelligence IN*. 21–36. <https://hrcak.srce.hr/file/279400>
- Haddadi, A. El, Haddadi, A. El, Dousset, B., Fennan, A., Haddadi, A. El, Haddadi, A. El, Dousset, B., & Fennan, A. (2020). *Le système d ' intelligence économique - XEW To cite this version : HAL Id : hal-02565316*. 1(8), 20–35. https://www.researchgate.net/publication/323498423_Le_systeme_d'intelligence_economique_-_XEW
- Hallegatte, S. (2014). Economic resilience: definition and measurement. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6852. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/350411468149663792/pdf/WPS6852.pdf>
- Ivan, V. (2013). Economic Intelligence. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 3(6), 1–14. <https://econpapers.repec.org/article/sppjkmeit/spi13-14.htm>
- Lan, C., Wang, X., Ren, J., Chen, X., & Chen, S. (2023). Intelligent government decision-making: A multidimensional policy text visualization analysis system. *China National Conference on Big Data and Social Computing*, 135–151. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3925-1_9
- Lončar, M. (2022). Problems and Perspectives of Economic Intelligence Nowadays. *Kultura Polisa*, 19(3), 110–130. <https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.3r.110l>
- Muravska, Y. (2023). Theoretical and Conceptual Approaches to Defining the Concept of Economic Intelligence in the Ukrainian Scientific Practice. *OER Osteuropa Recht*, 68(4), 476–485. <https://doi.org/10.5771/0030-6444-2022-4-476>
- Postolea, I. D., & Bodea, C.-N. (2021). Resilience and economic intelligence build through digitalization—an IT perspective. *Issues in Information Systems*, 22(1), 335–347. https://doi.org/10.2478/9788366675704-015?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle
- Potter, E. H. (1998). *Economic intelligence and national security*. McGill-Queen's Press-MQUP. <https://www.mqup.ca/Books/E/Economic-Intelligence-and-National-Security2>
- Revel, C. (2010). Economic intelligence: An operational concept for a globalised world. *Elcano Newsletter*, 69, 6. <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/economic-intelligence-an-operational-concept-for-a-globalised-world-ari/>
- Saksono, H., Humalanggi, M., Lantapon, N. N., & Butolo, I. (2023). Peran Intelijen Ekonomi dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Gorontalo. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 543–556. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.543-556>
- Sarjito, I. A., Purwanto, I. S. A., SE, M., Mualim, M., Sumarno, I. A. P., SAP, M. M., Deksino, G. R., Han, M., Susanto, M., & Sulistiyanto, S. E. (2024). *Geodefense Konsep Pertahanan Masa Depan*. Indonesia Emas Group. <https://www.myedisi.com/indonesiaemas/733003/geodefense-konsep-pertahanan-masa-depan>
- Siagian, J. R. P., & SIK, M. (2024). Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Era Teknologi Digital Guna Mendukung Transformasi Digital Nasional. *Lemhannas RI*. https://katalog.lemhannas.go.id/index.php?p=show_detail&id=212&keywords=
- Sidhom, S., Ghenima, M., Lambert, P., Sidhom, S., Ghenima, M., & Lambert, P. (2010). *Systèmes d ' information et Intelligence économique : enjeux et perspectives To cite this version : HAL Id : inria-00549766*. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/LABO-LORIA-SET/inria-00549766v1>
- Starostina, A. A., Kochkina, N., & Adami, C. (2022). Economic intelligence index and trade flow analysis. *Journal of International Studies*, 15(2), 9–23. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2022/15-2/1>

- Terintegrasi, M., & Daerah, F. (2025). *Sisi Ekonomi Inovasi Daerah*. 9, 1–16. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.1-16>
- Vargas-Hernández, J. G., & Cota, M. F. F. H. (2022). Strategic Organizational Resilience as a Response to the Crisis: Towards a Recovery of SMEs. In *Handbook of Research on Building Inclusive Global Knowledge Societies for Sustainable Development* (pp. 280–298). IGI Global. <https://www.igi-global.com/chapter/strategic-organizational-resilience-as-a-response-to-the-crisis/305197>